

**MENJAGA ASET *HERITAGE* DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MELALUI AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN:
PERBANDINGAN PRAKTIK AKUNTANSI DENGAN STANDAR PSAP 07**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

SYLVIA LINTANG HARTANTO

12200551

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2024

**HALAMAN PENGAJUAN
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi

**DISUSUN OLEH:
SYLVIA LINTANG HARTANTO
12200551**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA**

2024

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sylvia Lintang Hartanto
NIM : 12200551
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Menjaga Aset *Heritage* di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Akuntabilitas Laporan Keuangan: Perbandingan Praktik Akuntansi dengan Standar PSAP 07”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 01 Juli 2024

Yang menyatakan



Sylvia Lintang Hartanto
NIM. 12200551

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“MENJAGA ASET *HERITAGE* DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MELALUI
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN: PERBANDINGAN PRAKTIK
AKUNTANSI DENGAN STANDAR PSAP 07”**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

SYLVIA LINTANG HARTANTO

12200551

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi pada tanggal 25 Juni 2024

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Eka Adhi Wibowo, SE., M.Sc
(Ketua Tim Penguji)
2. Astuti Yuli Setyani, SE., M.Si., Ak., CA.
(Dosen Penguji)
3. Servatia Mayang Setyowati, S.Pd., M.Sc.
(Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 28 Juni 2024

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si., CSA., CRP



Rossalina Christanti, SE., M.Acc.

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

**MENJAGA ASET *HERITAGE* DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MELALUI AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN: PERBANDINGAN
PRAKTIK AKUNTANSI DENGAN STANDAR PSAP 07**

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 13 Juni 2024



Sylvia Lintang Hartanto

12200551

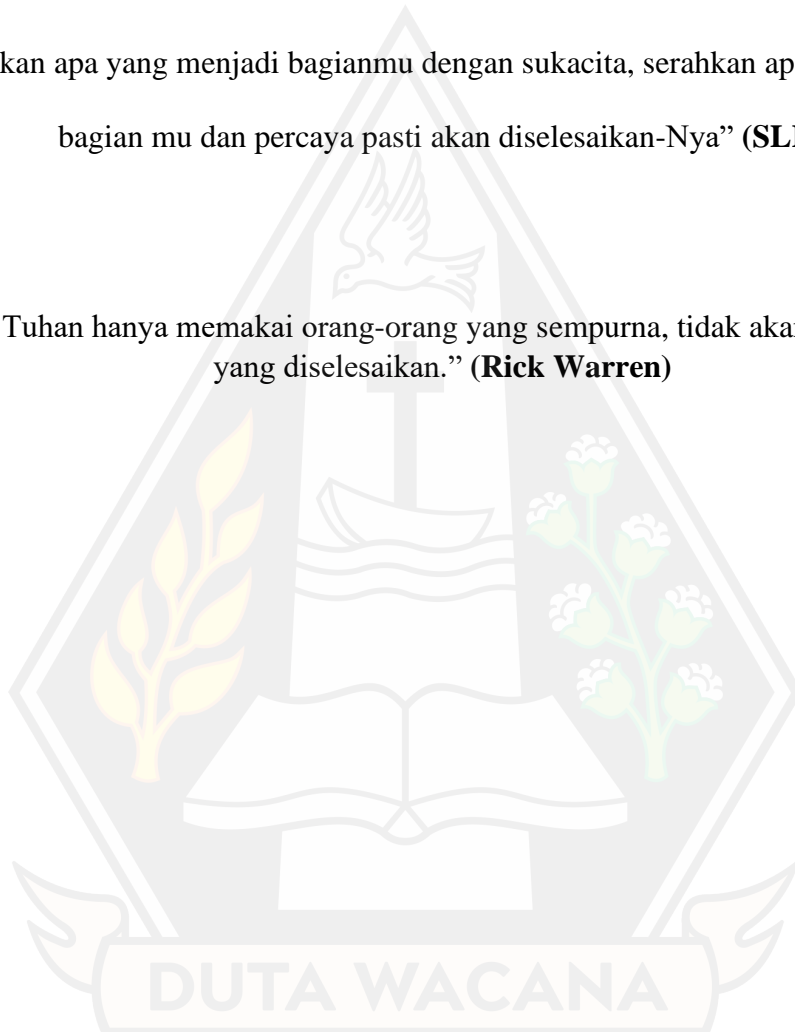
DUTA WACANA

HALAMAN MOTO

“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.” (**Amsal 1:7**)

“Lakukan apa yang menjadi bagianmu dengan sukacita, serahkan apa yang bukan bagian mu dan percaya pasti akan diselesaikan-Nya” (**SLH**)

“Jika Tuhan hanya memakai orang-orang yang sempurna, tidak akan pernah ada yang diselesaikan.” (**Rick Warren**)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis memahami bahwa dalam proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan. Untuk itu, penulis berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan menjadi Bapa yang selalu menuntun disetiap musim hidup.
2. Kedua orang tua, Mama Sri Utami dan Papa Hartanto, Adik Immanuel Surya Tanuwijaya dan Celine Wulan Kintan Hartanto, dan Mama Ging yang sudah seperti orang tua penulis sendiri serta sepupu penulis Ci Eva yang telah memberikan semangat, doa, dana dan motivasi selama perkuliahan hingga menuntaskan tugas akhir ini.
3. Ibu Servatia Mayang Setyowati, S.Pd., M.Sc. yang telah menjadi dosen pembimbing selama proses penyusunan seminar proposal hingga skripsi serta didikan selama masa perkuliahan.
4. Teman-teman di Kelompok Studi yang memberikan kesempatan penulis untuk bertumbuh dan belajar bersama.
5. Sahabat dekat penulis Yulitria dan Kak Sani yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi dari masa SMA sampai sekarang.
6. Teman-teman selama kuliah Kak Lero, Aulia, Jessica, Chio, Heri, teman-teman seperbimbingan Bu Mayang, teman-teman penghuni ruang KS yaitu Dhea, Eva, Randa, Mario, Heny, Prisil, Fredrik, Yoan, dan Portu.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

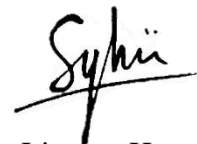
- (1) Ibu Servatia Mayang Setyowati, S.Pd., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Pihak Pemerintah Daerah yang mengelola aset *heritage* yang telah membantu dalam memperoleh data yang diperlukan;
- (3) Papa Hartanto dan Mama Sri Utami sebagai orang tua saya dan adik Immanuel Surya Tanuwijaya dan Celine Wulan Kintan Hartanto, serta Mama Ging dan sepupu saya Ci Eva yang telah memberikan bantuan dukungan material, semangat, doa dan moral;
- (4) Kelompok Studi Audit (KSA) yang menjadi tempat belajar bersama dan bertumbuh selama kuliah;
- (5) Teman-teman selama kuliah, Jessica Carmelita Esteban, Heriansyah, Kak Agnes Febrina Lero, Chionia Windy Merrici Ferreira, Kak Marrifa Angelica, Aulia Yundri Ekasiwi Snae serta teman-teman seperbimbingan

dengan Bu Mayang serta teman-teman penghuni ruang ks yaitu Dhea, Eva, Randa, Mario, Heny, Prisil, Fredrik, Yoan, dan Portu.

(6) Sahabat penulis, Yulitria dan Kak Sani yang telah mendukung dalam doa serta memberikan semangat selama ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan literasi.

Yogyakarta, 13 Juni 2024



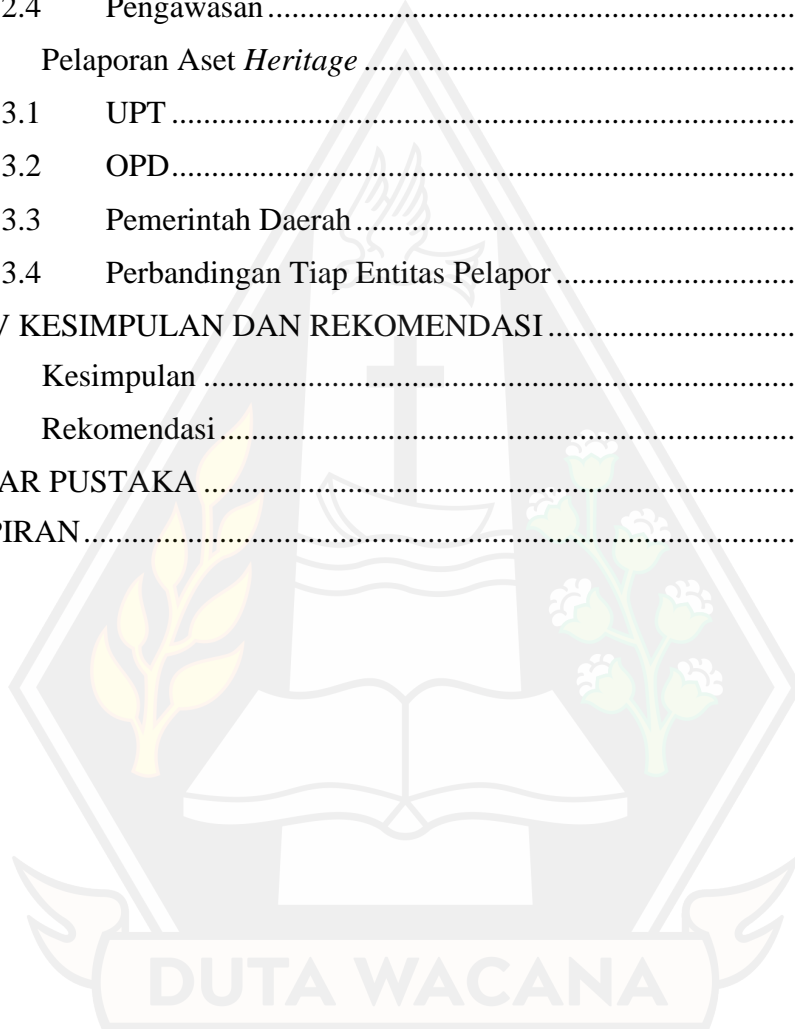
Sylvia Lintang Hartanto



DAFTAR ISI

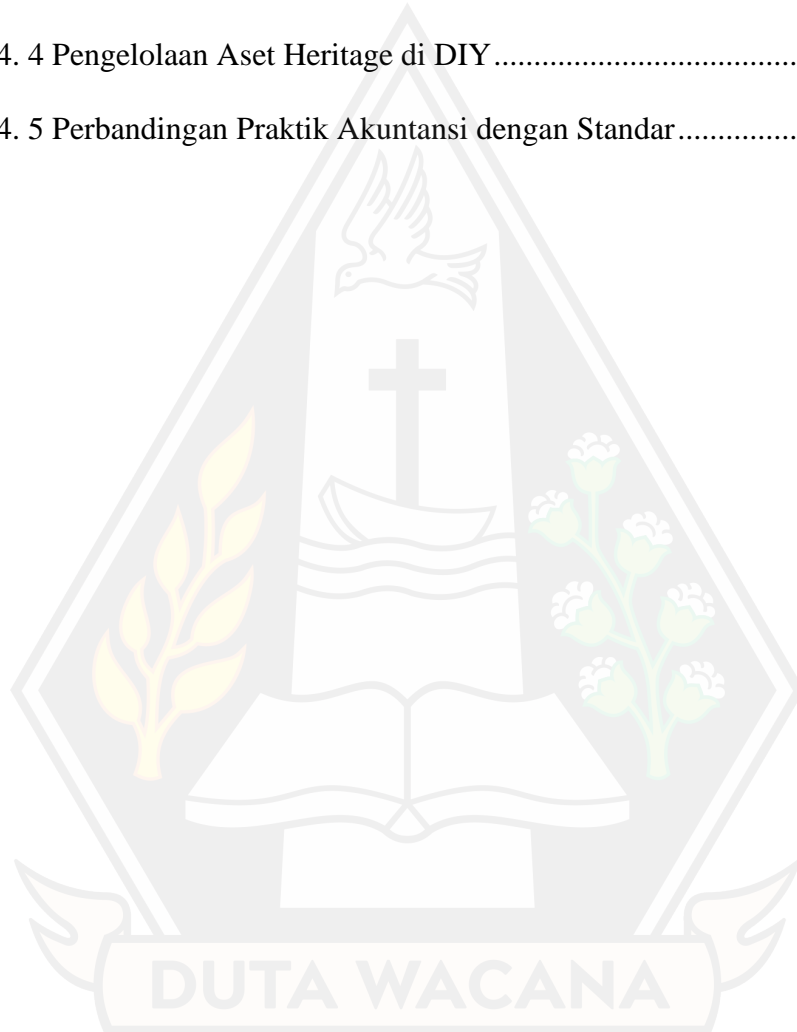
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kontribusi Penelitian.....	7
1.5 Batasan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.2 Aset <i>Heritage</i>	10
2.3 Standar Akuntansi Aset <i>Heritage</i>	11
2.3.1 IPSAS 17 <i>Property, Plant, and Equipment</i>	12
2.3.2 PSAP 07 Aset Bersejarah.....	12
2.4 Aset <i>Heritage</i> di DIY	14
2.5 Pendanaan Aset <i>Heritage</i>	15
2.6 Kerangka Berpikir	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Data dan Sumber	20
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	21

3.4	Langkah-langkah Penelitian.....	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		22
4.1	Sampel Penelitian.....	22
4.2	Pengelolaan Aset <i>Heritage</i>	28
4.2.1	Birokrasi.....	28
4.2.2	Penetapan Aset <i>Heritage</i>	31
4.2.3	Pelestarian	34
4.2.4	Pengawasan	49
4.3	Pelaporan Aset <i>Heritage</i>	50
4.3.1	UPT	50
4.3.2	OPD.....	53
4.3.3	Pemerintah Daerah	54
4.3.4	Perbandingan Tiap Entitas Pelapor	57
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Rekomendasi.....	68
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN.....		74



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Standar PSAP 07 Aset Bersejarah.....	13
Tabel 4. 1 Sampel Penelitian.....	22
Tabel 4. 2 Daftar Informan.....	22
Tabel 4. 3 Sampel Penelitian.....	25
Tabel 4. 4 Pengelolaan Aset Heritage di DIY	40
Tabel 4. 5 Perbandingan Praktik Akuntansi dengan Standar.....	61



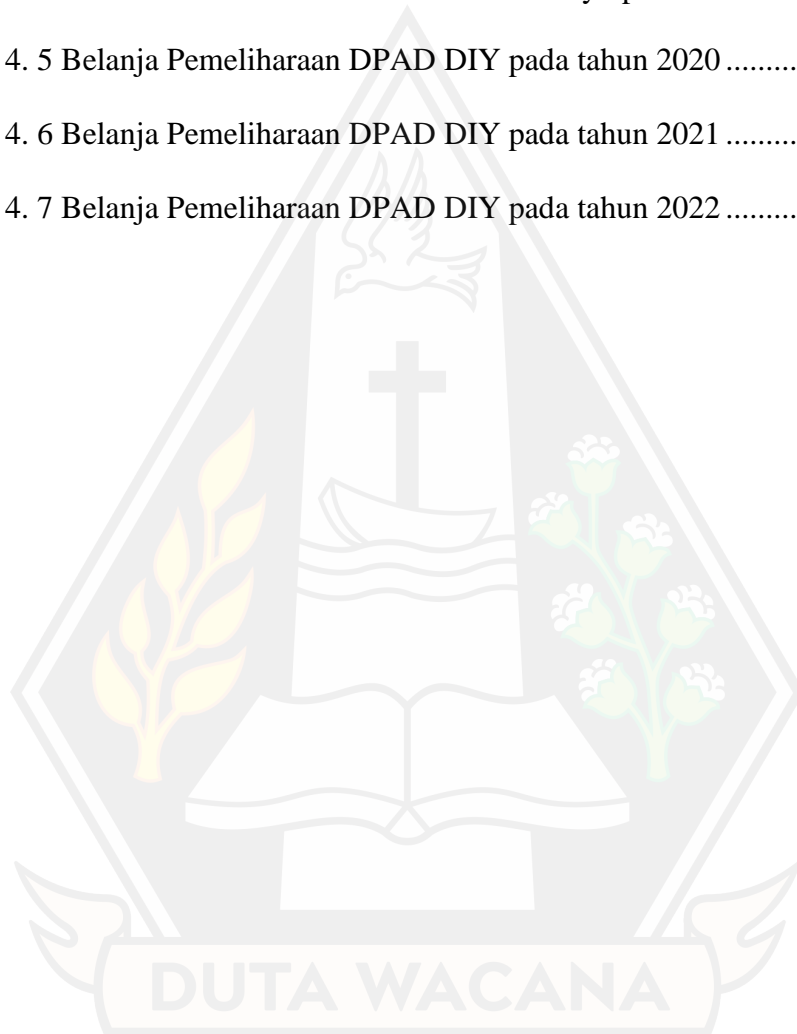
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir 19



DAFTAR BAGAN

Bagan 4. 1 Lokasi AH.....	24
Bagan 4. 2 Tipe Unit	33
Bagan 4. 3 Level Aset Heritage	34
Bagan 4. 4 Beban Pelestarian di Museum Sonobudoyo pada tahun 2021	36
Bagan 4. 5 Belanja Pemeliharaan DPAD DIY pada tahun 2020	37
Bagan 4. 6 Belanja Pemeliharaan DPAD DIY pada tahun 2021	38
Bagan 4. 7 Belanja Pemeliharaan DPAD DIY pada tahun 2022	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Wawancara ke Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	74
Lampiran 2 Surat Jawaban Wawancara dari BPK Wil. X	75
Lampiran 3 Surat Jawaban Wawancara dari Museum Sonobudoyo.....	76
Lampiran 4 Surat Jawaban Wawancara dari Dinas Kebudayaan DIY 1	77
Lampiran 5 Surat Jawaban Wawancara dari Dinas Kebudayaan DIY 2	77
Lampiran 6 Surat Jawaban Wawancara dari Museum Benteng Vredeburg	78
Lampiran 7 Dokumentasi Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	79
Lampiran 8 Dokumentasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X	79
Lampiran 9 Dokumentasi Museum Sonobudoyo.....	79
Lampiran 10 Dokumentasi Disbud DIY (bagian WB dan Keuangan)	80
Lampiran 11 Dokumentasi Disbud DIY (Bag. Permuseuman)	80
Lampiran 12 Instrumen Wawancara	81
Lampiran 13 Halaman Persetujuan	84
Lampiran 14 Kartu Konsultasi	85
Lampiran 15 Lembar Revisi.....	86
Lampiran 16 Poin Keaktifan	87
Lampiran 17 Turnitin	88

**MENJAGA ASET *HERITAGE* DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MELALUI AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN:
PERBANDINGAN PRAKTIK AKUNTANSI DENGAN STANDAR PSAP 07**

Sylvia Lintang Hartanto

12200551

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

Email: sylvilint@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan dan praktik pelaporan aset *heritage* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama berupa laporan keuangan pada tahun 2017-2023 dan data primer sebagai data pendukung berupa wawancara dengan pihak yang bertanggung jawab atas aset *heritage* yaitu yaitu Dinas Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan, museum, dan Taman Budaya Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan metode *archival study* secara *hand collecting*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset *heritage* di Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjukkan adanya birokrasi yang bertingkat, penetapan sebagai perlindungan dan pengawasan sebagai pengendalian aset *heritage*. Lebih lanjut, temuan ini menjelaskan adanya keberagaman dan inkonsistensi dalam penerapan pelaporan aset *heritage*.

Kata Kunci: Aset *Heritage*, PSAP 07, Akuntabilitas, barang bersejarah, Daerah Istimewa Yogyakarta, penilaian dan pengukuran

***SAFEGUARDING HERITAGE ASSETS IN THE SPECIAL REGION OF
YOGYAKARTA THROUGH FINANCIAL STATEMENT
ACCOUNTABILITY: A COMPARISON OF ACCOUNTING PRACTICES
WITH PSAP 07 STANDARDS***

Sylvia Lintang Hartanto

12200551

Department Accounting Faculty of Business

Duta Wacana Christian University

Email: sylvilint@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explain the management and reporting practices of heritage assets in the Special Region of Yogyakarta. The data used in this study are secondary data as the main data in the form of financial statements in 2017-2023 and primary data as supporting data in the form of interviews with parties responsible for heritage assets, namely the Culture Office, Culture Preservation Centre, museums, and Taman Budaya Yogyakarta. Data collection using archival study method by hand collecting. The results show that the management of heritage assets in the Special Region of Yogyakarta is shown by the existence of a multilevel bureaucracy, stipulation as protection and supervision as control of heritage assets. Furthermore, the findings explain the diversity and inconsistency in the application of heritage asset reporting.

Keyword: Heritage Assets, PSAP 07, Accountability, historical items, Special Region of Yogyakarta, valuation and measurement

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinobatkan sebagai daerah yang kaya akan kebudayaan yang meninggalkan jejak sebagai Warisan Budaya (WB) dan tetap terjaga serta hidup bersama masyarakat (Afrianto, 2020). Menurut pengakuan Bp. Rully selaku perwakilan Dinas Kebudayaan DIY (Disbud DIY) pada rapat kerja Pansus BA 18 tahun 2023 bahwa DIY memiliki 910 Cagar Budaya (CB) yang tersebar di Kabupaten/Kota di DIY (E-Parlemen DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023). Pemeliharaan yang tetap terjaga ini memberikan peranan penting dengan nilai-nilai yang membentuk DIY sehingga dinobatkan sebagai Kota Pelajar dan Kota Wisata (Afrianto, 2020). Peranan dari Keraton Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman melahirkan banyak pusat pendidikan dan pembinaan seni dan budaya yang hingga saat ini masih beroperasi (Afrianto, 2020).

Selain itu DIY menjadi daerah yang bersifat istimewa, yang mana diatur dalam UU RI No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu adanya Kerajaan Mataram Islam yang masih berjaya sampai saat ini (Presiden Republik Indonesia, 2012). Menurut undang-undang tersebut menjelaskan bahwa DIY memiliki kewenangan istimewa yaitu kepemimpinan secara tradisional yang merupakan warisan budaya bangsa yang disebut kesultanan dan kadipaten. Hak keistimewaan ini dipertimbangkan karena Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman berperan dan memberikan

sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Presiden Republik Indonesia, 2012).

Ciri khas dan keunikan dari peninggalan nilai-nilai yang masih terjaga ini dimanfaatkan sebagai objek wisata yang sangat populer di kalangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara dan ini menjadi sektor utama dalam perekonomian masyarakat DIY (Afrianto, 2020). Hal ini didukung dengan data jumlah kunjungan wisatawan di DIY tertinggi sepanjang 2018-2022 yaitu sebanyak 28,3 juta orang, di tahun 2019 dan di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan akibat pasca Covid-19 dengan jumlah 19,3 juta orang berdasarkan data statistik kepariwisataan (Dinas Pariwisata DIY, 2022). Selain itu, karena banyak pusat pendidikan yang dibangun yang menarik para pelajar dari berbagai daerah (Ciputra, 2022). Penulis berargumen bahwa banyaknya kehadiran para pelajar serta wisatawan menjadikan sektor pariwisata serta pendidikan menjadi sektor utama perekonomian masyarakat.

Peninggalan bersejarah yang bersifat kebendaan dapat dikatakan sebagai Aset *Heritage* (AH) yang biasanya dikelola oleh instansi guna pelestarian dan mendapat dukungan dana dari pemerintah daerah atau pusat, aset inilah yang menjadi ciri khas aset sektor publik (Widodo, Hanun, and Wulandari 2020a; International Public Sector Accounting Standards Board 2017; Redmayne, Laswad, and Ehalaiye 2023). Di Indonesia, warisan budaya yang dilindungi diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang menjelaskan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Presiden Republik Indonesia, 2010).

Pendanaan AH sebagian besar merupakan pendapatan dari pajak, yang mana merupakan partisipasi dari masyarakat terhadap negara (Widodo et al., 2020). Pendanaan AH yang ada di DIY diperoleh dari alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Keistimewaan (Danais) (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). Berdasarkan data Menkeu, Alokasi Danais yang diberikan dari APBN setiap tahunnya rata-rata mengalami kenaikan sebesar 23,21% dari tahun 2013-2022 dan realisasi belanja Danais rata-rata juga mengalami kenaikan sebesar 20,75% (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017). Peneliti berargumen bahwa adanya komitmen yang kuat dan dorongan oleh instansi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Sedangkan, dilihat dari besaran Danais pada tahun 2022 yang paling tinggi dialokasikan untuk urusan kebudayaan sebesar 69,3%, bahkan melebihi dari setengah dana yang diterima (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). Penulis berargumen bahwa pemerintah pusat serius dalam menanggapi perkembangan pelestarian serta menjaga WB yang dapat berdampak bagi sektor pariwisata daerah.

Penelitian ini mengusulkan bahwa AH harus dilaporkan dalam laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban serta media komunikasi kepada pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan (Biondi et al., 2021; Redmayne et al., 2023; Widodo et al., 2020). Keputusan ini menjadi penting sebagai penentu keberlanjutan jangka panjang dari AH atas laporan keuangan yang diterima (Bottero et al., 2020; De Wolf et al., 2021; Redmayne et al., 2023). Tentunya laporan tersebut harus sesuai dengan standar dengan kualitas laporan keuangan yang harapannya membantu mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya (Bullivant, 2018; Schmidhuber et al., 2022; Widodo et al., 2020). Namun, saat ini

masih banyak perdebatan dalam penerapan standar akuntansi sektor publik dalam pelaporan AH (Aversano et al., 2019; Biondi et al., 2021; Redmayne et al., 2023).

Pada tahun 2017 *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) mengeluarkan *Consultation Paper* (CP) sebagai bahan diskusi dan dilanjutkan dengan analisis *Comment Letter* (CL) tanggapan tertulis dari para pemangku kepentingan terhadap CP, yang mana memperdebatkan pelaporan AH di dalam neraca sebagai aset atau kewajiban atau cukup dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) (Redmayne, Laswad, and Ehalaiye 2023; Biondi, Grandis, and Mattei 2021; De Wolf, Christiaens, and Aversano 2021). Penerapan standar akuntansi yang berkembang untuk AH secara internasional termuat dalam IPSAS 17 (*Property, Plant, and Equipment*) tidak mensyaratkan pengakuan AH sebagai aset tetap (Aversano et al., 2019; International Federation of Accountants (IFAC), 2020). Penelitian sebelumnya menyebutkan terdapat hambatan dalam penerapan IPSAS 17 seperti penerapan berbasis akrual sehingga dalam praktiknya membuktikan keberagaman dan inkonsistensi pendekatan dan sebagai contoh museum di Selandia Baru cenderung enggan menilai AH sehingga tidak diakui sebagai aset akibat asumsi umur benda yang tidak dapat ditentukan (Redmayne et al., 2023). Pada survei yang dilakukan oleh Aversano et al. (2020) mayoritas pemerintah (sebesar 46%, sisanya setuju dan sebagian setuju) tidak setuju dengan pernyataan mengenai pengakuan aset warisan secara nominal biaya satu unit mata uang, pernyataan tersebut berasal dari negara-negara Eropa dan Australia. Hal ini bertentangan dengan prinsip akuntansi secara nasional di beberapa negara tersebut, sebagai contoh di Italia yang memegang bahwa setiap informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah harus merepresentasikan dengan hormat dan

komitmennya, karena dengan pengakuan sebesar 0 atau 1 nilai mata uang sama dengan tidak memberikan nilai apapun pada AH yang penuh dengan nilai (Aversano et al., 2020).

Selain itu dalam penelitian Ferri, Sidaway, and Carnegie (2021) menjelaskan pada fase evolusi kedua dalam penerapan standar akuntansi AH mengalami perdebatan juga dalam penilaian, Museum Queensland di Australia mengungkapkan bahwa koleksi benda museum tertentu seharusnya diberikan toleransi pengecualian karena benda yang sensitif secara budaya, rahasia, dan sakral tidak perlu dilakukan penilaian secara moneter (Ferri et al., 2021). Menurut Bullivant (2018) menjelaskan bahwa lingkungan global saat ini memandang WB sebagai fokus investasi. Bank Dunia mengatakan bahwa investasi pada WB menjadi bagian dari pertumbuhan hijau yang inklusif serta pembangunan berkelanjutan dengan memaksimalkan penggunaan kembali aset-aset tersebut (Bullivant, 2018). Penulis berargumen bahwa inilah yang menjadi salah satu alasan dari perdebatan bagi pada penelitian sebelumnya untuk melaporkan AH dalam laporan keuangan (De Wolf, Christiaens, and Aversano 2021).

Di Indonesia penerapan standar akuntansi AH yaitu PSAP 07 dalam praktiknya dianggap kurang optimal karena secara fisik aset tampak ada, namun tidak tercatat dalam daftar aset (Syah et al. 2022). Standar akuntansi PSAP 07 yang telah dikembangkan ini mengacu pada IPSAS secara penuh dan memperhatikan landasan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana dalam aset *heritage* ini mengacu pada UU RI No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Presiden Republik Indonesia, 2010). Sebagai contoh pada Balai Pemuda Surabaya yang termasuk dalam CB juga secara keseluruhan belum menerapkan PSAP 07 dikarenakan,

keterbatasan pemahaman entitas atas standar AH sehingga tidak ada pengungkapan bangunan tersebut sebagai aset yang dimaksud (Ningtyas 2021). Ditambah pemerintah mengakui beban sebagai pengeluaran atas AH guna untuk pemeliharaan dan pengelolaan aset tersebut (Redmayne, Laswad, and Ehalaiye 2023). Kejelasan standarisasi AH masih harus dikaji lebih lanjut dan perbaikan dapat dilakukan sehingga transparansi dan keterbandingan laporan keuangan pemerintah menjadi perhatian penuh bagi pemangku kepentingan (Biondi and Lapsley 2014). Penulis berargumen dengan ketersediaan informasi akuntansi yang objektif dan tepat dapat menunjang untuk pengambilan keputusan.

Dari gap riset yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji karena AH menjadi bagian tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan yang menggunakan dana dari masyarakat melalui pajak. Sebagai bentuk pengawasan, pelaporan keuangan menjadi sorotan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas yang berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat (Pasoloran & Rahman, 2001). Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* mengatakan bahwa sebagai pihak *steward* yang melayani dengan sikap rasa memiliki yang bertanggung jawab kepada *principal* dan memiliki tujuan yang sama dengan kepentingan *principal* (Pasoloran & Rahman, 2001). Lebih lanjut, peneliti berargumen AH bergantung pada pengelolaan dari pemerintah sehingga keberlanjutan sesuai dengan pola pengelolaan dan pelaporan AH. Penelitian ini berkontribusi untuk menyatakan bagaimana keefektifan standar akuntansi AH di Indonesia sebagai pedoman dalam penerapan pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan AH dalam laporan keuangan pemerintah pada praktiknya. Penelitian sebelumnya mengkaji praktik akuntansi untuk AH di Selandia Baru dengan melihat

pengakuan serta pelaporan AH dalam laporan keuangan museum (Redmayne, Laswad, and Ehalaiye 2023). Penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya, namun terdapat perbedaan pada ciri khas AH yang dimiliki DIY yang didominasi budaya pada masa Kerajaan Mataram hingga Kolonial Penjajahan. Berdasarkan penjelasan diatas maka, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Menjaga Aset *Heritage* Di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Akuntabilitas Laporan Keuangan: Perbandingan Praktik Akuntansi dengan Standar PSAP 07”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini menganalisis:

1. Bagaimana pengelolaan AH oleh instansi yang mengurus AH di DIY?
2. Bagaimana praktik pelaporan AH oleh entitas pelapor berdasarkan PSAP 07?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan pengelolaan AH di DIY.
2. Untuk menjelaskan praktik pelaporan AH di DIY.

1.4 Kontribusi Penelitian

Pada penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada setiap instansi yang mengelola AH untuk meningkatkan kualitas pelaporan aset tersebut secara transparan dan akuntabilitas. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai penerapan PSAP 07 yang mengatur AH dalam pengakuan, penilaian, pengukuran, pelaporan dan pengelolaan AH, sehingga memberikan wawasan dan pandangan

baru. Bagaimana standar akuntansi yang berlaku sudah efektif diterapkan dapat memberikan informasi yang berkualitas bagi pemangku kepentingan atau belum dalam praktiknya. Hal ini juga dapat menjadi pedoman dan usulan bagi pembuat kebijakan akuntansi dalam pengkajian lebih lanjut standar untuk AH, seperti definisi AH, pengakuan nilai aset, kriteria pengukuran, dan pengungkapan. Selain itu, penelitian ini menambah literatur mengenai praktik akuntansi AH di Indonesia atau terkhusus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga penelitian ini dapat dikembangkan dengan gabungan ilmu kesejarahan dengan ilmu akuntansi dan pembahasan yang mendalam mengenai pengelolaan AH.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya melakukan analisis pada praktik pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan AH dalam laporan keuangan Pemerintah DIY serta melihat keefektifan standar akuntansi yang berlaku dengan membandingkan. Dalam hal ini AH yang mana merupakan WB atau CB yang bersifat kebendaan pada masa Mataram hingga Kolonial Penjajah yang menjadi fokus objek penelitian. AH yang dipilih yang merupakan aset yang digunakan untuk objek pariwisata DIY seperti tempat rekreasi, study tour, pertunjukan seni hingga tempat kuliner. Penulis berargumen bahwa pemerintah yang mengoptimalkan AH sebagai objek wisata dapat meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata tersebut. Penelitian ini juga menyoroti Danais yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah DIY guna dialokasikan untuk urusan kebudayaan. Selain itu, penulis juga menyajikan data, yang mana terdapat instansi pusat juga turut melestarikan dan mengelola AH yang berlokasi di DIY.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini mengkaji bagaimana pengelolaan dan pelaporan AH oleh instansi yang memiliki dan mengelola AH di DIY. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih menunjukkan keberagaman dan inkonsistensi dalam penerapan standar PSAP 07, hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Ningtyas, 2021; Redmayne et al., 2023). Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat kesulitan dalam penerapan akuntansi AH pada penilaian dan pengukuran, yang mana dalam penentuan nilai sebagai aset serta penentuan nilai moneter atau angka dibalik aset tersebut (Biondi et al., 2021). Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya dengan berfokus pada pengungkapan kualitatif penting dilakukan dalam pelaporan sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas sesuai dengan sudut pandang teori *stewardship* (Davis et al., 1997; Redmayne et al., 2023).

Temuan pada penelitian ini yaitu pada umumnya sudah dilakukan pengelolaan dengan baik untuk pelestarian dan keberlanjutan AH. Dengan bentuk birokrasi yang bertingkat untuk pemisahan tugas sehingga mengurangi risiko dan pengawasan secara langsung pada AH. Selain itu bentuk mekanisme penetapan sebagai landasan hukum dalam pengakuan dan perlindungan juga telah ditetapkan. Temuan lainnya pada pelaporan AH di DIY masih belum sepenuhnya menerapkan PSAP 07 dan terdapat

ketidaksesuaian serta inkonsistensi. Penulis berargumen bahwa adanya kemungkinan pada pihak *steward* atau pihak pengelola yang terkendala dalam penilaian dan pengukuran yang tepat pada AH. Kemungkinan yang kedua bahwa standar yang sudah berlaku belum menjelaskan terkait penilaian, pengukuran dan definisi AH yang jelas. Kemungkinan yang ketiga yaitu pada pihak regulator yang menyusun standar dapat mengkaji lebih lanjut PSAP 07 atas kendala dalam penerapan pelaporan AH. Hal ini dapat menjadi saran penelitian selanjutnya untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data laporan keuangan pada tingkat Pemerintah Daerah dan regulator standar akuntansi pemerintah.

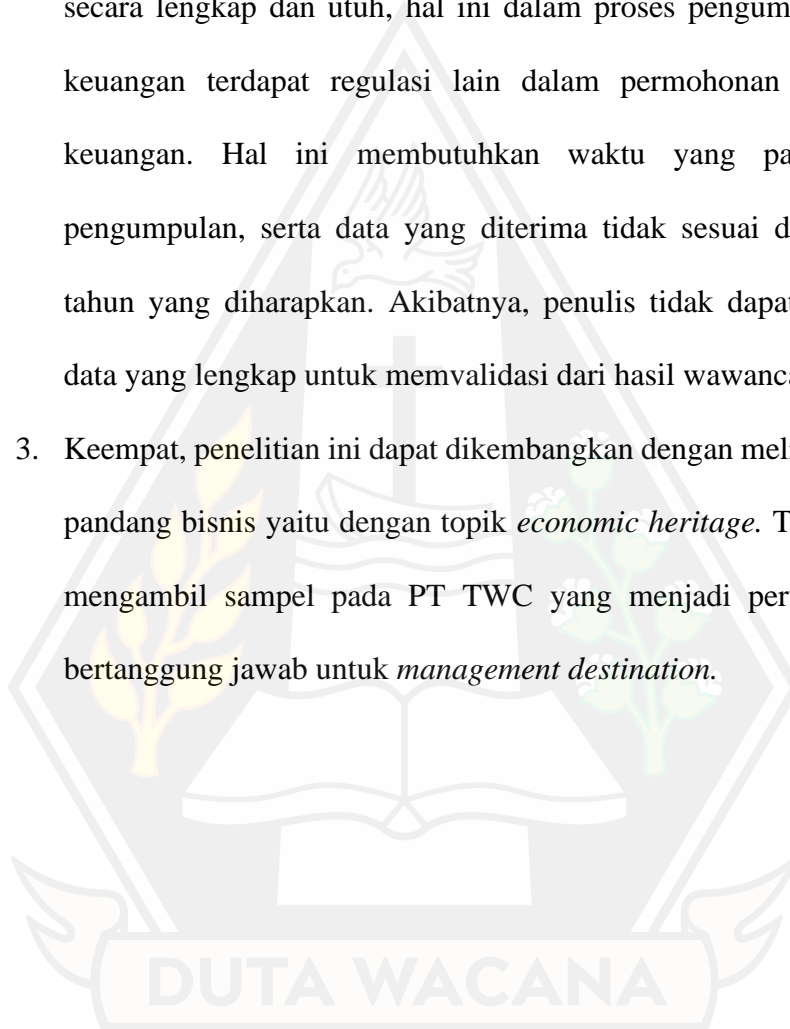
5.2 Rekomendasi

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan dalam proses penyelesaian penelitian.

1. Pertama, penulis berhasil melakukan wawancara dengan instansi yang mengurus aset *heritage* yaitu dari pihak BPK Wil. X, Dinas Kebudayaan, DPAD, Museum Sonobudoyo, TBY, Museum Benteng Vredeburg. Selama proses wawancara, kebanyakan narasumber merekomendasikan untuk mendatangi BPKAD yang menjadi badan yang mengurus aset daerah sebagai entitas akhir dalam pelaporan. Pada praktiknya, dalam satu instansi terdapat beberapa seksi yang mengurus WB dan CB tersendiri, atau seksi koleksi dan seksi laporan BMN tersendiri. Sehingga dalam proses wawancara, informasi yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu pihak dan tentunya wawancara dengan pihak pengelola keuangan atau akuntansinya untuk melihat dari

sisi akuntansi suatu instansi. Selain itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil data dari Keraton Yogyakarta serta Kadipaten Pakualaman yang menjadi informasi tambahan yang memiliki keistimewaan tersendiri di DIY.

2. Kedua, penelitian ini tidak memiliki cukup informasi laporan keuangan secara lengkap dan utuh, hal ini dalam proses pengumpulan laporan keuangan terdapat regulasi lain dalam permohonan data laporan keuangan. Hal ini membutuhkan waktu yang panjang dalam pengumpulan, serta data yang diterima tidak sesuai dengan jumlah tahun yang diharapkan. Akibatnya, penulis tidak dapat memperoleh data yang lengkap untuk memvalidasi dari hasil wawancara.
3. Keempat, penelitian ini dapat dikembangkan dengan melihat dari sudut pandang bisnis yaitu dengan topik *economic heritage*. Topik ini dapat mengambil sampel pada PT TWC yang menjadi perusahaan yang bertanggung jawab untuk *management destination*.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, D. (2020). Yogyakarta, Daerah Istimewa dengan Peran yang Juga Istimewa. *Kompas.Id*.
- Amzy, N., Rosalinda, H., Galasro Limbong, E., & Artikel, S. (n.d.). *ANALISIS HERMENEUTIK MOTIF GUIRLANDE PADA PELIPIT CANDI-CANDI PENINGGALAN MATARAM KUNO* *Hermeneutical Analysis of Garland Motifs in the Spiral Ornamentation of Ancient Mataram Era Temples*. 20(2), 2024. <https://doi.org/10.25105/dim.v20i2.18821>
- Aversano, N., Christiaens, J., Tartaglia Polcini, P., & Sannino, G. (2019). Accounting for heritage assets: An analysis of governmental organization comment letters on the IPSAS consultation paper. *International Journal of Public Sector Management*, 33(2–3), 307–322. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-12-2018-0275>
- Biondi, L., Grandis, F. G., & Mattei, G. (2021). Heritage assets in financial reporting: a critical analysis of the IPSASB's consultation paper. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 33(5), 533–551. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-09-2020-0158>
- Biondi, L., & Lapsley, I. (2014). Accounting, transparency and governance: The heritage assets problem. *Qualitative Research in Accounting and Management*, 11(2), 146–164. <https://doi.org/10.1108/QRAM-04-2014-0035>
- Bottero, M., D'Alpaos, C., & Marengo, A. (2020). An application of the a'WOT analysis for the management of cultural heritage assets: The case of the historical farmhouses in the aglie castle (Turin). *Sustainability (Switzerland)*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/su12031071>
- Bullivant, J. M. (2018). *Heritage Is An Asset How Sheffield is missing a development opportunity A DISCUSSION PAPER FROM THE CENTRE FOR WELFARE REFORM*. www.centreforwelfarereform.orgwww.timewalk.btck.co.uk
- Ciputra, W. (2022). Awal Mula Yogyakarta Dijuluki Kota Pelajar Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Awal Mula Yogyakarta Dijuluki Kota Pelajar. *Kompas.Com*.
- Davis, J. H., David Schoorman, F., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. In *Source: The Academy of Management Review* (Vol. 22, Issue 1).
- De Wolf, A., Christiaens, J., & Aversano, N. (2021). Heritage assets in the due process of the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). *Public Money and Management*, 41(4), 325–335. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1727114>

- Dinas Pariwisata DIY. (2022). *Statistik Kepariwisataaan DIY 2022*.
<https://visitingjogja.jogjaprov.go.id/webdinas/download/statistik-kepariwisataaan-diy-tahun-2022/>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Annual Report tahun 2022*.
- E-Parlemen DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023, August). *Pansus BA 18 Tahun 2023 Tindaklanjuti Pembahasan terkait Cagar Budaya*.
<https://www.dprd-diy.go.id/pansus-ba-18-tahun-2023-tindaklanjuti-pembahasan-terkait-cagar-budaya/>
- Ferri, P., Sidaway, S. I. L., & Carnegie, G. D. (2021). The paradox of accounting for cultural heritage: a longitudinal study on the financial reporting of heritage assets of major Australian public cultural institutions (1992–2019). *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 34(4), 983–1012.
<https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2019-3807>
- Hunt, B. E., Mayouf, M., Ashayeri, I., Ekanayake, E. M. A. C., & Nikologianni, A. (2023). *Managing Facilities in Historic Buildings: A Stewardship-Based Strategy for Long-Term Socio-economic Value*. <https://doi.org/10.3390/land>
- International Federation of Accountants (IFAC). (2020). *IPSAS 17 - Property, Plant, and Equipment*. https://www.ipsasb.org/_flysystem/azure-private/publications/files/A11-IPSAS_17_1.pdf
- International Public Sector Accounting Standards Board. (2017). *Overview of the Consultation Paper: Financial Reporting for Heritage in the Public Sector*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). *PSAP 07*.
<https://www.ksap.org/standar/PSAP07.pdf>
- Kota, H. B., & Charumathi, B. (2018). *Determinants of Financial Derivative Disclosures in an Emerging Economy: A Stewardship Theory Perspective*.
- Laksmi Nurita Tanjung, Dyah Mutiarin, & Eko Priyo Purnomo. (2018). MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013-2017. *Jurnal Agregasi*, 6, 1–125.
<http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>
- Mar'atus Sholikhah, & Bety Nur Achadiyah. (2017). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah “Candi Rimbi” Jombang. *Jurnal Nominal*, 6.
<https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16644>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). *PMK RI No. 173/PMK.07/2017*.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- Napier, C. J., & Giovannoni, E. (2021). Accounting for heritage assets: Thomas Holloway’s picture collection, 1881–2019. *British Accounting Review*, 53(2).
<https://doi.org/10.1016/j.bar.2020.100944>

- Ningtyas, R. O. (2021). KEBIJAKAN AKUNTANSI HERITAGE ASSETS TERKAIT STANDAR PSAP NOMOR 07 TAHUN 2010. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21, 86–101.
- Pasoloran, O., & Rahman, F. A. (2001). Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 3.
- Prasetyo, D., Sastrawan Manik, T., & Riyanti, D. (2021). *PEMANFAATAN MUSEUM SEBAGAI OBJEK WISATA EDUKASI*.
<https://asosiasimuseumindonesia.org/>
- Presiden Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Presiden Republik Indonesia. (2012). *UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Redmayne, N. B., Laswad, F., & Ehalaiye, D. (2023). Measurement and reporting of heritage assets - Insights from practice in New Zealand. In *Measurement in Public Sector Financial Reporting: Theoretical Basis and Empirical Evidence* (pp. 171–192). Emerald Group Publishing Ltd.
<https://doi.org/10.1108/978-1-80117-161-820231009>
- Schillemans, T., & Bjurstrøm, K. H. (2020). Trust and verification: balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. *International Public Management Journal*, 23(5), 650–676.
<https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807>
- Schmidthuber, L., Hilgers, D., & Hofmann, S. (2022). International Public Sector Accounting Standards (IPSASs): A systematic literature review and future research agenda. In *Financial Accountability and Management* (Vol. 38, Issue 1, pp. 119–142). John Wiley and Sons Inc.
<https://doi.org/10.1111/faam.12265>
- Setyowati, S. M. (2023). TRANSAKSI PIHAK BERELASI, PERAN AUDITOR, DAN NILAI PERUSAHAAN: BUKTI DARI INDONESIA. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 18(2), 141.
<https://doi.org/10.21460/jrak.2022.182.425>
- Syah, A. A., Rahmawaty, A., Itmam, M. S., Islam, I. A., & Kudus, N. (2022). Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah di Museum R. A. Kartini Berdasarkan Perspektif Islam dan Tinjauan PSAP Nomor 7 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2733–2741. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6570>
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. (n.d.). Retrieved December 4, 2023, from <https://www.bing.com/ck/a?!&p=75c2e7b0d4a0a9e6JmltdHM9MTcwMTU2MTYwMCZpZ3VpZD0yNjBhYTUwNS0yNzU4LTYzZTAzMmUyZS1i>

NzFIMjZmNDYyNDMmaW5zaWQ9NTIxNg&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=260aa505-2758-63e0-2e2e-b71e26f46243&psq=Undang-Undangan+RI+Nomor+13+Tahun+2012+tentang+Keistimewaan+Daerah+Istimewa+Yogyakarta&u=a1aHR0cHM6Ly9wZXJhdHVyYW4uYnBrLmdvLmlkL0hvbWUvRG93bmxvYWQvMjg0NTcvVVUIMjBOB21vciUyMDEzJTlwVGFodW4lMjAyMDEyLnBkZg&ntb=1

Presiden Republik Indonesia. (2010). *UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.

Widodo, H., Hanun, N. R., & Wulandari, R. (2020). Accounting Treatment for Heritage Assets: A Case Study on Management of Pari Temple. *Journal of Accounting and Investment*, 21(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2101138>

